

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Dasar pemikiran

Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang biasa dikenal banyak orang dengan sebutan DKI Jakarta merupakan ibukota negara Republik Indonesia. Salah satu kota yang terletak di pulau Jawa ini menempati kota dengan penduduk terpadat di Indonesia. Bagaimana tidak, kota ini merupakan pusat migrasi orang-orang dari berbagai daerah di seluruh penjuru Indonesia yang ingin mencari penghidupan yang lebih layak. Berbondong-bondongnya warga lokal dalam migrasi ke Jakarta mengantarkan Jakarta kepada perkembangan menjadi salah satu kota yang cukup maju di Indonesia.

Dalam sejarahnya sendiri, Jakarta merupakan bekas pusat pemerintahan masa colonial Belanda. Sejarah berdirinya Jakarta sendiri berlangsung secara kronologis terhitung dimulai pada abad ke 14. Di abad ke 14 Jakarta sebelumnya bernama Sunda Kelapa menjadi pusat dari pelabuhan bagi kapal-kapal dagang asing yang berlabuh disana. Karena, memang Jakarta dahulu kala dalam perkembangan perdagangan memiliki letak yang strategis dan kerap kali menjadi persinggahan kapal-kapal dagang yang melewatinya.

Setelah Sunda Kelapa, Jayakarta menjadi nama selanjutnya dari pergantian nama bagi Jakarta itu sendiri. Pergantian nama tersebut diakibatkan adanya penyerangan di Sunda Kelapa pada abad ke 16 dan kemudian setelahnya Jakarta berganti nama lagi menjadi stad Batavia. Stad Batavia atau lebih dikenal dengan nama Batavia bertahan agak lama sebelumnya diubahnya kembali dan secara resmi

menjadi kota Jakarta.

Jakarta masa kini merupakan wajah baru dari kota Batavia yang berubah namanya menjadi kota Jakarta. Sejauh perkembangan sebuah ibukota, perkembangan Jakarta yang maa merupakan pusat daerah ibukota pemerintahan dan perekonomian mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibanding dengan kota lainnya mengingat Jakarta hadir sebagai pusat kota, pusat perkembangan ekonomi, pemerintahan, politik, sosial budaya dan teknologi yang ada.

Terjadinya urbanisasi di kota Jakarta menjadi salah satu faktor kemajuan tersendiri namun juga berkebalikan daripada itu. Urbanisasi di kota Jakarta ini menyajikan beragam aspek perkembangan dalam kehidupan ber masyarakat di kota tersebut. Mulai dari multikulturalisme, percampuran budaya atau akulturasi serta asimilasi dari segi sosial dan budaya masyarakat Jakarta sendiri dengan masuknya budaya-budaya diluar Jakarta, ataupun persaingan antar suku disana.

Dengan kehadiran urbanisasi yang ada juga turut menjadikan kota Jakarta maju menjadi pusat pemerintahan atau bahkan hingga pusat ekonomi Indonesia. Hal tersebut yang akan mendasari kebijakan-kebijakan serta merta upaya pemerintah setempat dalam me-modernisasi kota Jakarta menjadi kota yang berbudaya. Kebijakan dan atau upaya yang dilakukan tidak lain tidak bukan merupakan cerminan dari masyarakatnya sendiri yang lahir menjadi masyarakat yang berbudaya yang meskipun begitu, dalam perjalanannya tidak akan mudah dan akan menghadapi banyak rintangan kedepannya.

Tentu saja bukan perkara mudah menghadapi kekayaan seni hingga kebudayaan Jakarta yang potensial dan hal itulah yang akan menjadi alah satu faktor rintangan bagi Jakarta dan Pemerintah hingga Gubernur kedepannya. Maka,

pelaksanaan kebijakan atau Upaya-upaya yang dilakukan terus berkelanjutan dari satu periode hingga periode selanjutnya, dari satu pemimpin hingga ke pemimpin selanjutnya.

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia dan sekaligus sebagai ibukota negara dipimpin oleh seorang Gubernur. Jakarta mengalami perkembangan dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Sebagai ibukota, Jakarta memang banyak terlihat perbedaannya dari masa ke masa. Tentu saja hal tersebut tidak lepas dari peran Gubernur dan masyarakatnya.

Berdasarkan buku *Jakarta-Batavia: esai sosio-kultural* dapat terlihat perbedaan kondisi kota Jakarta dahulu dengan Jakarta di masa kini. DKI Jakarta sebagai provinsi dati I yang berstatus ibu kota negara Republik Indonesia memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia. DKI Jakarta lebih bersifat perkotaan dan selalu berkembang dengan cepat mengikuti perkembangan jumlah penduduknya. Jumlah penduduk Jakarta terus mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Masuknya warga luar Jakarta yang mencari peruntungan disini tak ayalnya membuat Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan salah satu penduduk terpadat di Indonesia. Perkembangan kota ini disesuaikan dengan tingkat pertumbuhan dan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Perkembangan fisik kota Jakarta telah ditata berdasarkan rencana induk tahun 1965-1985. Kondisi kota Jakarta dalam pembangunan fisik telah mulai jelas tampak struktur perkembangan kotanya sesuai dengan rencana induk, ditunjukkan dengan fisik kota yang telah dibangun pada tahun 1977. Perkembangan tersebut dimaksudkan agar menumbuhkan gerak kegiatan kehidupan kota Jakarta secara keseluruhan sebagai suatu sistem yang bersifat makro.

Perbedaan Jakarta dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia sebagai ibu kota negara dalam melaksanakan fungsi dan peranannya harus menampilkan tiga wajah utama yaitu wajah lokal, wajah nasional dan wajah internasional. **Wajah lokal** sendiri bagi Jakarta berfungsi untuk memperhatikan kehidupan penduduk Jakarta, yang mana rata-rata berpendapatan rendah. **Wajah nasional** bagi Jakarta berfungsi sebagai tempat keputusan-keputusan penting yang menyangkut berbagai aspek kehidupan dan pembangunan Jakarta sebagai ibu kota negara. **Wajah internasional** bagi Jakarta berfungsi sebagai pintu gerbang utama keluar masuk Indonesia mengingat tempat-tempat pemerintahan berada dikota ini.

Berperan sebagai ibukota negara, Jakarta merupakan pusat daerah pemerintahan aktif di Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan dan perkotaan, tentu saja Jakarta memiliki beban tersendiri dibanding daerah lainnya. Setiap wisatawan atau orang luar negeri yang datang ke Indonesia pasti melihat Jakarta sebagai wajah negara ini, apakah meninggalkan kesan yang cukup baik atau sebaliknya. Jakarta sejak masa demokrasi terpimpin meninggalkan pejabat walikota karena untuk ditingkatkan menjadi Gubernur yang mana perannya bertujuan mewujudkan Jakarta sebagai wajah nasional yang meninggalkan citra baik di mata luar negeri. Namun, perwujudan citra baik bagi wajah Jakarta bukan hanya diperankan oleh pemimpin seorang melainkan juga untuk warga masyarakat berlaku.

Jakarta yang pernah terkenal sebagai si kampung besar menuju kota metropolitan dan berjuluk kota proklamasi kemerdekaan, kemudian berpredikat menjadi kota niaga, industri, pariwisata dan budaya di tahun 1980 serta sudah dimantapkan coraknya sebagai kota non agraris oleh Gubernur pada sidang pleno nya di DPRD DKI Jakarta. Kota yang bercorak non agraris merupakan lingkungan

yang berpengaruh besar kepada sikap warga kotanya menghadapi ‘struggle for life’ (perjuangan hidup) sehari-hari (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980). Terutamanya yang lagi dan dibesarkan di kota besar itu sendiri.

Anak-anak kelahiran Jakarta, memiliki sifat dan sikap serta jalan hidup yang berbeda dengan orang tuanya. Kecenderungan sifat dan sikap tersebut karena pengaruh mempertahankan hidup dan perjuangan hidup di ibukota metropolitan seperti Jakarta. Dianggap suatu ciri yang universal, bahwa orang kota cenderung menjadi individualistis dan dimungkinkan karena di DKI Jakarta dipenuhi oleh campurbaur peraturan nasional maupun internasional (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980).

Setap detik dan menit terjadi lalulintas kegiatan individual, maupun sosial dalam segala bentuk dan dimensi ruang waktu. Segala bentuk kehidupan diperjuangkan dibawah aturan main, etik dan kaidah orang kota yang bersifat : dinamik dan rasional. Dari segi pendidikan, diperoleh baik secara formal, informal, dirumah, di sekolah dan di tangan pergaulan masyarakat mendorong orang kota untuk membentuk pribadi yang dinamik dan rasional (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980).

Dalam hal diatas, DKI Jakarta dianggap layak juga berkembang sebagai kota non agraris dengan kemampuan untuk meningkatkan jasa-jasanya antara lain mengolah sumberdaya alam di tanah air sebagai pengekspor untuk memperoleh sumber devisa bagi pembangunan bangsa dan negara (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980).

Tercatat dalam sejarahnya lebih kurang 14 orang Gubernur telah memimpin kota ini. Gubernur-gubernur tersebut merupakan orang-orang terpilih yang sejak

tahun 2004 merupakan pilihan masyarakat Jakarta secara langsung. Berharap terjadi perubahan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya bukan hanya dalam sistem pemerintahannya saja tetapi perubahan yang menjurus ke tata kota yang akan membuat Jakarta terlihat lebih baik. Sebagai ibukota, bahkan hingga kini Jakarta merangkap menjadi pusat ekonomi serta pusat pemerintahan, dan menuju ke arah modern tentu peran Pemimpin atau Gubernur disini sangat dibutuhkan dan dipandang sebagai tonggak lahirnya yang akan membuat kota ini menjadi lebih maju.

Let. Jenderal TNI Tjokropranolo merupakan salah seorang dari banyak Gubernur yang pernah memimpin DKI Jakarta. Memerintah Jakarta dalam kurun waktu 1977 – 1982. Let. Jend. TNI Tjokropranolo diangkat menjadi Gubernur pada masa pemerintahan Presiden Soeharto (Orde Baru) dan diangkat menggantikan peran daripada Gubernur Ali Sadikin sebagai Gubernur Jakarta sebelumnya. Selama masa Orde Baru pemerintah berhasil melaksanakan enam kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan tahun 1998 (Sejarah Jakarta, n.d.) Pada periode atau kurun waktu 1966-1980 bisa dikatakan sebagai tahapan dari era konsolidasi Orde Baru dan Soeharto sebagai upaya untuk menggantikan posisi Soekarno.

Let. Jend. TNI Tjokropranolo kerap disapa *babe noly* ini lahir di Temanggung, Jawa Tengah. Seorang Gubernur Jakarta yang bukan merupakan anak asli Jakarta, namun dengan background maupun kepiawaian kerjanya tak mengelakkan bahwa kemudian diangkat menjadi Gubernur. Merupakan seorang anak bupati yang berkarir di bidang militer dan kemudian menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Sapaan *babe* tersebut diberikan dan diresmikan sebagai panggilan akrab dari

masyarakat Jakarta karena dianggap telah berjasa memimpin kota Jakarta. Memiliki riwayat pendidikan dan karir militer yang mumpuni tak ayalnya menjadikannya sebagai salah seorang pilihan untuk memimpin ibu kota negara Indonesia tersebut. Bahkan, pada masa Jenderal Soedirman pun memercayai Tjokropranolo sebagai tulang punggung perang gerilya untuk membantu Soedirman melawan kolonial Belanda.

Dari latar belakang tersebut Let. Jend. TNI Tjokropranolo kemudian mendapat kepercayaan untuk memimpin ibu kota negara Indonesia dalam kurun waktu satu periode dimulai pada tahun 1977 dan berakhir pada tahun 1982. Sebelum resmi menjabat sebagai gubernur Jakarta yang dilantik pada September 1977, beliau merupakan asisten Gubernur Ali Sadikin yang mana menjabat sebagai Gubernur periode sebelumnya. Dari jabatan asisten tersebut, kemudian Tjokropranolo diangkat menjadi pejabat Gubernur Jakarta baru kemudian diresmikan menjadi Gubernur Jakarta pada September 1977 berdasarkan kepres 107/M/1977.

Jakarta era Orde Baru tentu saja berbeda dengan Jakarta pada masa kini. Sebagai ibu kota negara Indonesia, Jakarta mengalami banyak perubahan utamanya dalam beberapa dasawarsa sesudah perang. (Grijns & Nas, 2007) Sejak tahun 1970-an terjadi perluasan kota secara ideologi dan fisik dengan menggabungkan kota Bogor, Tangerang dan Bekasi. (Grijns & Nas, 2007) Let. Jend. TNI Tjokropranolo selaku Gubernur DKI Jakarta yang memerintah melakukan beberapa kebijakan untuk DKI Jakarta. Kebijakan tersebut dilaksanakan tentu saja bertujuan demi menyejahterakan masyarakat sekitar dan semata-mata ingin merubah kota Jakarta menjadi baru. Kebijakan yang diupayakan oleh Tjokropranolo kadangkala menuai beragam komentar publik pada masa tersebut.

Kerap dibandingkan dengan Gubernur sebelumnya, yaitu Gubernur Ali Sadikin tak membuat semangat juangnya padam dalam menunaikan kewajibannya meyejahterakan Jakarta dan masyarakatnya. Kebijakan Tjokropranolo memang ada yang meneruskan kebijakan daripada Ali Sadikin yang belum tuntas, namun juga ada kebijakan yang digarap olehnya dalam mewakili suara rakyat kecil yang kerap kali tak terdengar.

Sebagai ungkapan “Ing Ngarsa sun tulada, Ing madya among karya, tutwuri handayani” yang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang yang mengungkapkan status pemimpin bahwasanya kepemimpinan adalah pengabdian bagi kepentingan umum. Bukan kebalikannya bahwa rakyat yang harus membayar untuk mendapatkan pelayanan (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980). Ke khasan dari DKI Jakarta adalah bahwa struktur pemerintahan yang berbeda dengan Daerah Tingkat I yang lain (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980). Gubernur sebagai penguasa Tunggal ialah manunggal, maka kepada setiap aparatura Pemerintahan DKI Jakarta tanpa kecuali dituntut untuk lebih peka dan komunikatif timbal balik terhadap suara hati-nurani warganya yang senantiasa diminta berpartisipasi aktif dalam Pembangunan bangsa dan negara (“Jakarta Sebagai Kota Non Agraris,” 1980).

Intelligentia - Dignitas

Dalam masa kepemimpinannya sendiri, Tjokropranolo menganut gaya Santai dan sedikit bicara yang mana gaya kepemimpinan itu dianggap berlawanan dengan Ali Sadikin. Bahkan dalam waktu satu tahun sejak dilantik dan menjabat sebagai Gubernur, upaya Tjokropranolo dianggap lamban dibandingkan upaya Ali Sadikin selama menjabat.

Tjokropranolo membuktikan bahwasanya upaya dan kebijakannya selama ini

merupakan salah satu cara yang memang berbeda dan lebih condong kepada masyarakat kelas bawah dibanding dengan Ali Sadikin yang seringkali dianggap memberatkan rakyat kelas bawah. Tjokropranolo lebih lunak dalam menjalankan pekerjaannya, karena memang tujuannya tidak mau memberatkan dan mempersulit masyarakat dan terutamanya warga miskin di Jakarta.

Tjokropranolo melakukan Turba (turun kebawah) dan anjongsana kepada masyarakat. Beragam kebutuhan warga Jakarta yang kurang mampu dihampiri dan disantuni. Golongan ekonomi lemah, buruh, tanah, panti asuhan. Sektor jasa dan infrastruktur yang berhubungan dengan pembangunan kota Jakarta selalu menjadi perhatiannya (BKKI, n.d.). Permasalahan Jakarta yang cukup kompleks di masa kini ataupun masa lalu masih terbilang sama. Sebagai pusat urbanisasi warga pelosok, Jakarta menampung cukup banyak orang didalamnya. Hal tersebut menimbulkan pelik dan berbagai permasalahan kota. Meskipun, permasalahan yang datang bukan hanya dari warga Jakarta asli saja melainkan juga dari para pendatang mengingat pesatnya pertumbuhan penduduk dari luar Jakarta yang setiap tahunnya bertambah.

Sebagai ibukota negara Republik Indonesia, Jakarta yang kemudian dipimpin oleh Gubernur Tjokropranolo dan dalam kiprah kepemimpinannya tersebut tak luput dari perhatian masyarakat dan pemerintahan. Bagaimana peran Gubernur Tjokropranolo dalam mengembangkan dan mengelola kota sangat diperhatikan dan dimaknai sangat dalam peran serta dampaknya. Dampak yang ditimbulkan bisa beragam dilihat dari bagaimana kebijakan, upaya dan tata kelola yang dijalani. Dampak-dampak tersebut dirasa sangat penting sebagai bahan dan bentuk evaluasi kedepannya bagi Jakarta atau pemimpin selanjutnya dan kebijakan tersebut

utamanya tak lepas dari peran masyarakat sekitar agar kebijakan yang ditetapkan bisa terlaksana demi memajukan kota Jakarta tercinta.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

a. Pembatasan Masalah

Agar peneliti bisa fokus mendalami masalah penelitian dan masalah yang diteliti tidak melebar pada permasalahan yang lain, diperlukan adanya suatu pembatasan masalah yang mencakup di dalamnya pembatasan spasial (ruang) dan pembatasan temporal (waktu). Untuk batasan spasialnya penelitian ini akan berfokus pada kota Jakarta dilengkapi dengan profil Gubernur Jakarta periode 1977-1982 yaitu Let. Jend. TNI Tjokropranolo. Sementara batasan temporal ditetapkan peneliti dengan batasan rentang waktu selama Gubernur Tjokropranolo menjabat terhitung dari tahun 1977-1982.

b. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dalam penelitian ini, telah menetapkan dua rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu :

1. Bagaimana profil dan kiprah Tjokropranolo semasa hidup dan semasa menjabat sebagai Gubernur Jakarta?
2. Bagaimana kebijakan dan dampak peran serta Gubernur Tjokropranolo terhadap Jakarta pada periode 1977-1982?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang penulis harapkan adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan Riwayat hidup Tjokropranolo secara rinci dan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Tjokropranolo

untuk pembangunan kota Jakarta

2. Mendeskripsikan Kebijakan maupun dampak dari peran serta Tjokropranolo selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 1977 - 1982

Sementara kegunaan dalam penelitian ini adalah untuk memperkaya khasanah sejarah di Indonesia khususnya sejarah kota Jakarta pada masa Orde Baru, bagaimana kebijakan-kebijakan yang diatur dalam membangun Jakarta serta dampaknya bagi masyarakat Jakarta sendiri, menambah pengetahuan mengenai salah satu tokoh sejarah pada masa Orde Baru yaitu salah satu mantan Gubernur DKI Jakarta Letnan Jenderal TNI Tjokropranolo dengan *background* militer yang disandang selama hidupnya juga selama menjabat selama satu periode sebagai pemimpin baru bagi warga Jakarta dan kiprah politiknya selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

D. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini membahas tentang peranan salah satu tokoh sejarah pada masa orde baru sekaligus merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta yang menjabat selama kurang lebih lima tahun atau satu periode dari tahun 1977 sampai tahun 1982 yaitu Letnan Jenderal TNI Tjokropranolo. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode historis dengan pendekatan deskriptif-naratif. Penelitian ini disajikan dalam bentuk deskriptif-naratif dengan memaparkan kejadian berdasarkan dimensi ruang dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan dengan prosedur dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian sejarah. Langkah-langkah dalam penelitian sejarah meliputi heuristik, verifikasi, Interpretasi, Historiografi.

Langkah pertama adalah *heuristik*, yaitu tahap pengumpulan sumber yang memuat informasi berkaitan dengan topik penelitian. Sumber primer yang banyak diperoleh dan menjadi acuan utama penulis ialah surat kabar dan majalah sezaman.

Sedangkan untuk sumber sekunder yaitu disampaikan bukan oleh saksi mata (Kuntowijoyo, 2013, p. 75). Bahkan sumber yang ditulis oleh sejarawan sekarang atau sebelumnya termasuk sumber kedua (Sjamsuddin, 2019, p. 68). Sumber sekunder penulis peroleh dari berbagai literatur (berupa jurnal, buku, skripsi, laporan penelitian dan website di internet yang kredibel untuk dijadikan sumber sekunder).

Langkah berikutnya adalah verifikasi atau kritik sumber. Langkah ini dilakukan setelah sumber telah terkumpul. Langkah ini berupaya mempermasalahkan kesejatan sumber untuk memperoleh otentisitas sumber melalui kritik ekstern maupun dari segi isinya untuk memperoleh kredibilitas sumber melalui kritik intern. Untuk sumber primer seperti majalah dan surat kabar, penulis tidak harus melakukan kritik ekstern karena arsip yang tersedia. Untuk sumber sekunder seperti buku-buku dan jurnal, penulis melakukan kritik intern untuk memastikan kredibilitas dari isi buku tersebut.

Langkah ketiga adalah menyimpulkan fakta-fakta sejarah dan mencari hubungan antar fakta sehingga perubahan peristiwa sejarahnya dapat terlihat dengan jelas dan runtut, serta kaitan antara peristiwa satu dengan peristiwa lainnya mudah dipahami. Langkah ini disebut Interpretasi

Langkah keempat atau langkah terakhir merupakan historiografi. Ini merupakan tahapan terakhir dan pada tahap ini penulis mendeskripsikan secara logis dan sistematis data-data yang telah diolah ke dalam bentuk tulisan atau historiografi.

Intelligentia - Dignitas